

Korelasi Pemikiran Kebangsaan Sartono Kartodirdjo Terhadap Konsep Politik Inspiratif Mahfud MD Perspektif Teori Strukturasi

Sifaul Amin

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatigara
sifaulamineshaemha@gmail.com

ABSTRAK

Mewujudkan bangsa yang maju tidak lepas dari peran pemikiran tokoh bangsa yang revolusioner dan adaptif. Sartono Kartodirdjo sebagai salah satu tokoh sejarawan senior di Indonesia terkenal akan pemikiran dan gagasannya, yang diantaranya adalah tentang kunci mewujudkan bangsa yang maju. Sartono Kartodirdjo mempunyai pemikiran bahwa dalam mewujudkan negara yang maju dan modern, tidak terlepas dari lima prinsip kehidupan yang harus senantiasa terapkan. Lima prinsip tersebut adalah persatuan dan kesatuan (*unity*), kemerdekaan dan kebebasan (*liberty*), persamaan hak (*equality*), identitas dan kebudayaan (*personality*), dan etos kerja (*performance*). Berbeda dengan Sartono Kartodirdjo, Mahfud MD sebagai tokoh bangsa yang saat ini masih eksis di kancah nasional mempunyai pemikiran mengenai konsep politik inspiratif yang selaras dengan pemikiran Sartono Kartodirdjo. Politik inspiratif adalah politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, kesetaraan dan memilih pemimpin yang adil dan jujur. Korelasi dan relevansi pemikiran dua tokoh tersebut penting untuk dikaji dan diaplikasikan dalam rangka mencapai tujuan nasional bersama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif analitis dengan pendekatan sosiologi. Penelitian ini mengkaji pemikiran Sartono Kartodirdjo dan Mahfud MD dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat korelasi dan keterkaitan yang erat antara pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan mewujudkan bangsa yang maju dengan pemikiran Mahfud MD tentang politik inspiratif. Pemikiran dua tokoh tersebut juga relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang membutuhkan upaya persatuan demi terwujudnya cita-cita bangsa menjadi bangsa yang maju.

Kata kunci: *Pemikiran, Sartono Kartodirdjo, Politik Inspiratif Mahfud MD, Strukturasi*

ABSTRACT

Creating an advanced nation cannot be separated from the role of revolutionary and adaptive thinking of national figures. Sartono Kartodirdjo, as one of the senior historians in Indonesia, is famous for his thoughts and ideas, including the key to creating a developed nation. Sartono Kartodirdjo has the idea that in creating a developed and modern country, there are five principles of life that must always be applied. The five principles are unity and integrity, freedom and liberty, equality, identity and culture (*personality*), and work ethic (*performance*). In contrast to Sartono Kartodirdjo, Mahfud MD, as a national figure who currently still exists on the national stage, has ideas about inspirational political concepts that are in line with Sartono Kartodirdjo's thoughts. Inspirational politics is politics that builds justice, law enforcement, equality and elects fair and honest leaders. The correlation and relevance of the thoughts of these two figures is important to study and apply in order to achieve common national goals. This research is qualitative research that is descriptive qualitative analytical with a sociological approach. This research examines the thoughts of Sartono Kartodirdjo and Mahfud MD from the perspective of Anthony Giddens' structuration theory. This research concludes that there is a close correlation and connection between Sartono Kartodirdjo's thoughts about the five principles of life to create an advanced nation and Mahfud MD's thoughts about inspirational politics. The thoughts of these two figures are also relevant to the current condition of the Indonesian nation which requires united efforts to realize the nation's ideals of becoming a developed nation..

Keywords: *Thought, Sartono Kartodirdjo, Mahfud MD's Inspirational Politics, Structuration*

PENDAHULUAN

Sebagai negara besar, Indonesia mempunyai cita-cita menjadi negara maju, yang dalam proses mewujudkannya tentu membutuhkan pemikiran yang matang dan relevan.

Mewujudkan Indonesia maju tidak terlepas dari berbagai macam dinamika dan romantika yang menghiasi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Demokrasi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat yang plural dan multikultural menjadi modal sekaligus tantangan tersendiri dalam mewujudkan Indonesia maju. Penyatuan berbagai macam perbedaan di masyarakat menjadi langkah pasti yang harus ditempuh dalam rangka mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia, di mana peleburan dan penyatuan berbagai macam perbedaan di masyarakat tersebut akan menanamkan dan mewujudkan jiwa patriotisme dan nasionalisme.

Nasionalisme dapat dimaknai sebagai faham yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu-padu dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional dalam kehidupan bernegara (Moesa, 2007). Nasionalisme juga bermakna sebagai suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme juga bermakna sebagai suatu perasaan sangat mendalam terhadap suatu ikatan yang erat dengan tanah air tumpah darahnya dan tradisi-tradisi yang mengakar dalam masyarakat setempat. Dalam arti modern, nasionalisme bermakna sebagai suatu perasaan yang diakui secara umum (Taufik Abdullah, 2001). Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai simbol besar yang revolusioner dan mengandung persamaan dan persaudaraan sebagai tanda kemenangan setelah kekuasaan asing berhasil digulingkan (Taufik Abdullah, 2001).

Mewujudkan Indonesia maju dengan modal nasionalisme tentu tidak bisa lepas dari konsep gagasan pemikiran para pahlawan yang mendirikan bangsa Indonesia, termasuk para tokoh pemikir yang ikut memberikan sumbangsih dalam mengiringi sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Diantara tokoh senior yang sangat berperan memberikan gagasan dan pemikirannya kepada bangsa Indonesia adalah Sartono Kartodirdjo. Konsep pemikirannya tentang bagaimana mewujudkan bangsa yang maju patut mendapatkan perhatian penting untuk menjadi acuan dalam menggapai cita-cita tersebut guna direfleksikan, difahami dan dipraktikkan. Sartono Kartodirdjo mempunyai pemikiran bahwa dalam mewujudkan negara yang maju dan modern, tidak terlepas dari lima prinsip kehidupan yang harus senantiasa terapkan. Lima prinsip tersebut adalah persatuan dan kesatuan (unity), kemerdekaan dan kebebasan (liberty), persamaan hak (equality), identitas dan kebudayaan (personality), dan etos kerja (performance) (Sularto, 2022).

Mewujudkan Indonesia maju tidak bisa terlepas dari praktik politik yang menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Praktik politik di Indonesia sangat berkaitan dengan upaya mewujudkan Indonesia maju. Praktik politik yang baik akan melahirkan sinergitas dalam tatanan negara Indonesia yang menjadi bagian dari proses mewujudkan Indonesia maju. Hal ini yang kemudian memunculkan konsep politik inspiratif yang dikampanyekan oleh Mahfud MD. Dalam politik inspiratif, masyarakat diajak untuk merubah paradigma yang selama ini terbangun yang beranggapan bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, pemilihan umum hanya ajang pemilihan pemimpin formalitas lima tahunan, dan berbagai macam paradigma negatif lainnya, padahal dalam konteks negara

demokrasi seperti di Indonesia, politik sangat menentukan maju mundurnya negara, karena pemimpin dan hukum merupakan hasil dari proses politik. Mewujudkan Indonesia maju tidak akan pernah tercapai apabila tidak mengubah paradigma pada aspek krusial yaitu politik, maka dalam hal ini Mahfud MD mendobrak dan mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma lama tentang politik yang bersifat negatif menjadi berparadigma positif. Dalam hal ini, paradigma negatif politik diubah menjadi paradigma positif melalui politik inspiratif, bahwa dalam politik inspiratif, politik merupakan suatu hal yang membangun keadilan, menegakkan hukum, membangun kesetaraan dan memilih pemimpin yang adil dan jujur.

Konsep pemikiran Sartono Kartodirdjo dan politik inspiratif Mahfud MD tentunya sangat berkaitan dan relevan dalam menghadapi situasi zaman sekarang, akan tetapi dibutuhkan formula untuk mengkoneksikan dua gagasan besar tersebut agar bisa menjadi acuan dalam mengaplikasikannya. Problem akademik yang muncul dari dua pemikiran tersebut adalah bagaimana korelasi dan relevansi pemikiran Sartono Kartodirdjo dengan politik inspiratif Mahfud MD dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menjawab hal tersebut, sudut pandang Sosiologi kiranya menjadi hal yang tepat untuk menganalisis permasalahan yang ada. Dalam hal ini digunakan teori sosiologi Strukturasi Anthony Giddens, di mana Giddens dalam teorinya membagi praktik sosial yang ada menjadi tiga macam gugus struktur yang kesemuanya saling berkaitan, pertama yaitu gugus struktur signifikansi, kedua dominasi, dan ketiga legitimasi. Teori strukturasi digunakan dalam menganalisis persoalan tersebut karena pada dasarnya pemikiran Sartono Kartodirdjo dan Politik Inspiratif Mahfud MD mempunyai kemiripan dan keterkaitan satu sama lain apabila difahami secara komprehensif dan radikal.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan teori strukturasi sebagai alat analisis maupun sebagai obyek. Zainal Abidin Achmad dari UPN Veteran Jawa Timur dalam karyanya memaparkan tentang hubungan antara nomenklatur dan konsep-konsep dalam teori strukturasi, di mana penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan baik dalam konsep dan metodologinya (Achmad & A, 2020). Abdul Firman Ashaf dalam karyanya mengemukakan bahwa relasi media, negara dan masyarakat adalah sebuah praktik sosial, bukan dikuasai negara atau kelas dominan karena selalu berada dalam situasi dinamis, cair dan prosedural (Ashaf & F, 2006). Penelitian Ashaf berbeda dengan yang penulis lakukan di mana perbedaan tersebut terselak pada obyek, metode dan hasil penelitian. Selanjutnya, Kristianto dalam karyanya menimbang kebijakan sumber daya manusia dengan teori strukturasi Giddens dan kajian feminis yang menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan sumber daya manusia belum maksimal memenuhi suara keadilan gender (Kristianto & E, 2022). Penelitian Kristianto berbeda dengan yang penulis lakukan baik dalam obyek dan metodologinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bermakna sebagai jenis penelitian yang mengkaji obyek material karya-karya dan sumber datanya

dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan obyek material penelitian tersebut (Kaelan, 2005). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mempunyai definisi sebagai metode yang digunakan untuk meneliti suatu obyek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia (Dewi & K, 2022), sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, maupun peristiwa dan obyek budaya lainnya (Kaelan, 2005). Metode kualitatif juga dapat difahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri (Furchan & A, 1992). Obyek penelitian ini adalah pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan menjadi bangsa yang maju dan pemikiran Mahfud MD tentang politik inspiratif yang kemudian dianalisis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens.

Penelitian ini mempunyai sumber data primer berupa pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan menjadi bangsa yang maju dan pemikiran Mahfud MD tentang politik inspiratif. Data sekunder sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa buku-buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan tokoh, judul ataupun permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian berupa buku, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Metode dokumentasi sendiri bermakna sebagai teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar maupun elektronik (Tanzeh & A, 2011).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tiga tahap analisis data yaitu mereduksi data, mengklarifikasi data, dan mendisplay data (Kaelan, 2005). Tahap mereduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting untuk kemudian dicari substansi dan pola-polanya. Tahap mengklarifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data berdasarkan ciri khas masing-masing berdasarkan obyek penelitian. Adapun tahap mendisplay data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data dalam suatu peta yang sesuai dengan obyek formal dan tujuan penelitian. Pendisplayan data dalam penelitian ini berupa penyajian data secara sistematis agar fokus dan mudah difahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kunci Kemajuan Bangsa Menurut Sartono Kartodirdjo

Sartono Kartodirdjo merupakan pakar sejarah Indonesia yang lahir dari pasangan Tjitrosarjo dan Sutiya. Sartono Kartodirdjo merupakan anak ke tiga yang lahir pada tanggal 15 Februari 1921 (Nursam & M, 2008). Kelahiran Sartono Kartodirdjo disambut dengan berbagai macam ritual dimulai dari dinyanyikannya tembang semalaman oleh para tamu laki-laki yang hadir dalam perjamuan selama lima hari lima malam hingga pertunjukan wayang yang menjadi nadzar dari Tjitrosarjo (ayahnya) yang sudah lama mendambakan kehadiran anak laki-laki (Nursam & M, 2008). Sartono Kartodirdjo menikah dengan Sri Kadaryanti pada tahun 1946 (Nursam & M, 2008) dan melahirkan seorang anak yang bernama Nimpono pada tahun 1950. Pada tahun 1953 Sri Kadaryanti kemudian melahirkan

anak keduanya yang diberi nama Roswitha (Nursam & M, 2008). Sartono Kartodirdjo wafat pada tanggal 7 Desember 2007 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dalam usianya yang ke 87 tahun. Sartono Kartodirdjo selama hidupnya tidak hanya memberikan contoh dan teladan sebagai sejarawan Indonesia, tetapi juga menginspirasi banyak pihak dengan pemikiran-pemikirannya bagi kehidupan bangsa yang masih eksis dikaji dan dikutip hingga saat ini.

Kiprah Sartono Kartodirdjo sangat luas tidak hanya dalam hal sejarah saja, tetapi juga dalam hal nasionalisme (Purwiyastuti & W, 2022). Menurut Sartono Kartodirdjo, dalam nasionalisme terdapat lima prinsip yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk wawasan nasional. Lima prinsip tersebut adalah pertama kesatuan (unity) yang dinyatakan sebagai *conditio sine qua non* atau syarat yang tidak bisa ditolak, kedua kemerdekaan (liberty) yang dalam hal ini termasuk kemerdekaan mengemukakan pendapat, ketiga persamaan (equality) bagi setiap warga negara untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, dan kelima kepribadian (personality) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa serta performance dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain (Kartodirdjo & S, 1992).

Istilah nasionalisme dalam hal ini secara umum mengacu pada gagasan dan sentimen pembentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai macam identitas lain seperti agama, suku, teritorial, bahasa dan kelas. Nasionalisme merupakan paham yang meyakini kebenaran pemikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu padu dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Murod & C, 2011). Nasionalisme yang difahami dengan benar akan melahirkan ide dan upaya perjuangan dalam rangka mewujudkan negara-bangsa, di mana secara empirik hal ini yang menjadi unsur pokok yang sangat kuat dalam membentuk nasionalisme dan membantu mempercepat proses evolusi nasionalisme ke arah pembentukan negara nasional (Moesa, 2007).

Politik Inspiratif: Keadilan

Keadilan dapat bermakna keadaan yang ada dalam jiwa seseorang dan membuatnya lurus (Puskomjar, 2023). Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan yang sama dalam situasi yang sama. Maka, apabila dikaitkan dalam bidang politik dan hukum, bermakna bahwa harus ada perlakuan secara umum politik dan hukum terhadap setiap orang serta tidak mengenal pengecualian (Suseno & M, 1994). Dalam perspektif Pancasila, sebagaimana bunyi sila kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia harus sadar untuk senantiasa menciptakan keadilan secara proporsional yaitu adil sesuai dengan hakikat dan kodrat manusia dalam posisinya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk tuhan (Faisal, 2021). Keadilan proporsional yang terbentuk dalam diri manusia akan berkorelasi positif bagi terwujudnya manusia yang bersih dari sifat-sifat tercela seperti korup, rakus, sewenang-wenang dan ingin menang sendiri (Achmadi & A, 2009). Keadilan menjadi bentuk penghormatan terhadap seluruh hak yang dimiliki oleh manusia tanpa ada pengurangan dalam pelaksanaannya (Lebacqz & K, 1986). Dengan demikian dengan alasan apapun sekelompok orang atau negara tidak boleh membatasi atau melanggar hak seorang warga negara.

Politik sebagai sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di masyarakat menuntut terwujudnya keadilan di Masyarakat (Islamiyati, 2019). Politik dan keadilan mempunyai korelasi secara langsung dan konkrit bahwasannya politik seharusnya tidak hanya menghasilkan kekuasaan pribadi dan golongan, tetapi harus menghasilkan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat (Widayani & H, 2017). Prinsip keadilan akan melekat dalam cara manusia bertindak sesuai kodrat dan akal budinya. Hukum sebagai produk politik dan akal budi manusia harus bisa mewujudkan keadilan karena apabila tidak bisa mewujudkan keadilan maka akan bertentangan dengan kodrat akal budi manusia itu sendiri.

Keadilan tidak hanya harus terwujud dalam dimensi isinya saja tetapi juga harus terwujud dalam dimensi praktik. Konsep keadilan tidak bisa hanya berdasar pada asumsi kehendak kebanyakan dan pertimbangan kepentingan pribadi yang berkuasa sebagai hasil dari proses politik. Keadilan yang hanya direduksi dari kehendak masyarakat kebanyakan maka hanya akan memunculkan sikap anarkhisme, yaitu paham yang memuja opini umum publik langsung sebagai kebenaran atau keadilan dalam hukum. Kehendak kebanyakan masyarakat tidak bisa dipandang sebagai kebenaran atau keadilan dalam hukum karena kehendak tersebut hanya tampil sekedar sebagai emosi atau sentiment belaka.

Keadilan harus terbebas terhadap emosi kehendak kebanyakan masyarakat demi terwujudnya hukum yang adil. Hukum yang berkeadilan merupakan hukum yang lahir dari keputusan hukum yang bebas dari kepentingan penguasa yang mungkin dapat bersifat diktatorial. Dalam konteks Indonesia, formulasi keadilan sebagai salah satu tujuan hukum tercermin dalam Pancasila bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada dimensi substansi semata, tetapi juga harus terpraktikkan dalam kehidupan karena terdapat korelasi langsung dan konkrit antara politik, moral, dan hukum.

Politik Inspiratif: Kesetaraan

Secara umum kesetaraan memiliki arti sebagai menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah satu sama lain (Barir & M, 1992). Dalam politik, kesetaraan merupakan suatu bentuk keadaan di mana para anggota masyarakat berada dalam kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik. Kesetaraan dalam politik mengharuskan bahwa setiap warga negara selalu diperlakukan sama tanpa memandang ras, gender, agama ataupun kecerdasan dan kondisi ekonominya, di mana konsep kesetaraan dalam politik ini dapat diejawantahkan dalam bentuk prinsip satu orang satu suara dan kesetaraan di hadapan hukum. Kesetaraan juga harus diejawantahkan dalam bentuk pengakuan terhadap berbagai perbedaan sosial dan budaya, sehingga tidak boleh terdapat diskriminasi terhadap kelompok tertentu hanya karena perbedaan norma sosial dan budaya (Putri & F, 2023).

Kesetaraan politik (political equality) termasuk salah satu prinsip dasar pemerintahan yang demokratis, di mana kesetaraan politik memerlukan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk berperan dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik. Prinsip kesetaraan politik seringkali diwujudkan dalam semboyan “one person one vote”, akan tetapi semboyan tersebut belum mencerminkan kesetaraan politik yang dimaksudkan oleh pemerintahan yang demokratis.

Politik Inspiratif: Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta tegaknya kebenaran dan keadilan yang di dalamnya tidak terdapatnya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik favoritisme yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan Masyarakat (Didik, 2013). Inti dan arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejawantahkan sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Rahardjo & S, 2000).

Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman ditentukan berdasarkan tiga proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Sukadi & I, 2012). Ketiga komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang bermakna bahwa komponen-komponen tersebut sangat menentukan proses penegakan hukum di masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya karena kegagalan pada salah satu komponen akan berdampak terhadap faktor yang lainnya (Didik, 2013).

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Mertokusumo & S, 1986). Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu keniscayaan dan hakikat dari penegakan hukum adalah proses dalam mewujudkan ide-ide tersebut (Rahardjo & S, 2009). Hukum tidak hanya sebatas sebagai suatu sistem aturan, tetapi juga harus difahami bahwa hukum juga sebagai suatu sistem nilai, sehingga selain adanya kepastian hukum juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Teori Strukturisasi Anthony Giddens

Anthony Giddens merupakan ilmuwan sosial kelas dunia yang menjadi dosen tetap sosiologi di Universitas of Cambridge dan mengembangkan Polity Press, sebuah lembaga penerbitan akademik yang mampu memproduksi sekitar 80-an buku setiap tahunnya. Giddens memenuhi banyak kriteria akademik yaitu sebagai ilmuwan sosial kelas dunia, administratur yang berhasil, pengusaha dan seseorang yang mempunyai kemampuan politik dan interpersonal. Sebagai ilmuwan, Giddens tidak hanya melahirkan karya-karya ilmiah kualitatif yang bermutu, tetapi juga merupakan seorang pemikir yang produktif secara kuantitatif (Nashir & H, 2012). Diantara buah karya pemikiran Giddens adalah teori strukturasi yang dibangun dalam proses panjang kritik dan sintesis. Giddens memusatkan perhatiannya pada upaya untuk merekonstruksi teori sosial secara radikal karena teori yang ada tidak memadai lagi dalam memahami kondisi masyarakat modern dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya (Craib & I, 1992).

Strukturasi menjadi konsep sosiologi utama dari Anthony Giddens sebagai kritik terhadap teori fungsionalisme dan evolusionalisme dalam teori strukturalisme. Teori strukturasi berintikan pada tiga konsep utama yaitu tentang struktur, sistem, dan dualitas struktur (Giddens & A, 2010). Giddens berpandangan bahwa dalam penelitian ilmu sosial atau sejarah pasti melibatkan pengaitan tindakan dengan struktur, dan tidak mungkin struktur menentukan Tindakan (Goodman & R, 2008). Strukturasi memandang akan pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun

struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi juga mengacu pada suatu cara di mana struktur sosial diproduksi, direproduksi dan diubah ke dalam dan melalui praktik.

Teori Strukturasi Giddens mencakup berbagai hal tentang kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal, keterbukaan dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan sehari-hari dan kekeliruan pemisahan antara agen dan struktur dalam sosiologi. Teori Strukturasi digunakan Giddens untuk berusaha melampaui batas-batas fungsionalisme dan kegigihannya dalam mentransformasikan dikotomi antara agen dan struktur telah diterima dalam lingkungan sosiologi mutakhir.

Giddens mempunyai pandangan bahwa struktur itu sebagai tata aturan dan sumber daya atau *rules and resources* (Jary & J, 1991) yang selalu diproduksi dan direproduksi, mempunyai hubungan dualitas dengan agensi, dan melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial. Teori Strukturasi Giddens memandang bahwa obyektifitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang dilakukan pelaku (Priyono & H, 2002). Giddens melihat bahwa terdapat tiga gugus struktur yang saling berkaitan satu sama lain. Struktur pertama yaitu struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas orang dan barang. Ketiga, struktur pembenaran yang menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Priyono & H, 2002).

Giddens dalam teori strukturasinya mengaitkan struktur dan tindakan sosial tersebut dalam relasi agensi yang melahirkan praktik-praktik sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara tersusun atau terstruktur yang berpola dan bukan sebagai suatu kebetulan. Teori strukturasi mempunyai fokus penting yaitu hubungan antara agensi dengan struktur yang menjelaskan dualitas dan hubungan antara agensi dan struktur yang bersifat dialektis. Agensi dan struktur tidak sapat dipisahkan satu sama lain, sehingga semua tindakan sosial melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Giddens berpendapat bahwa aktivitas tidak dilakukan oleh aktor sosial tetapi secara berkelanjutan diciptakan berulang melalui sarana yang digunakan untuk mengekspresikan diri mereka sebagai aktor, dan di dalam melalui aktivitas-aktivitas mereka agen menghasilkan kondisi yang memungkinkan adanya aktivitas-aktivitas tersebut (Goodman & R, 2008).

Teori strukturasi Giddens menempatkan kekuasaan pada aktor dan tindakan yang bertolak belakang dengan teori-teori yang cenderung mengabaikan orientasi tersebut dan justru mementingkan fenomenologi (niat aktor) atau struktur eksternal (fungsionalisme struktural) (Goodman & R, 2008). Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive conscious*). Motivasi tak sadar (*unconscious motives*) menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tetapi bukan tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif (*discursive conscious*) mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci dan eksplisit terhadap tindakan yang kita lakukan atau terdapat alasan-alasan bagi semua tindakan kita. Kesadaran praktis (*practical consciousness*) menunjuk kepada gugus pengetahuan yang tidak selalu bisa diurai yang menjadi sumber rasa aman ontologis (*ontological security*) (Priyono & H, 2002). Kesadaran praktis menjadi kunci dalam memahami proses bagaimana

berbagai tindakan dan praktik sosial kita yang kemudian menjadi struktur dan bagaimana struktur itu mengekang atau memampukan tindakan atau praktik sosial.

Strukturasi Pemikiran Sartono Kartodirdjo Terhadap Konsep Politik Inspiratif Mahfud

Strukturasi menengarai pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun struktur. Terdapat hubungan dialektik antara struktur dan tindakan. Di dalam teori strukturasi terdapat dua titik berat yaitu tentang dualitas struktur dan relasi ruang waktu, akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada dualitas struktur.

Konsep dualitas struktur yang terlibat dalam teori strukturasi berhubungan dengan sifat kehidupan sosial yang bersifat berulang secara fundamental dan timbal balik antara struktur dengan pelaku, sehingga tercipta hubungan erat antara struktur dengan pelaku. Giddens berpendapat bahwa struktur merupakan aturan atau sumber daya yang terus menerus terlibat ke dalam reproduksi sistem sosial (Giddens & A, 2009). Struktur mengacu pada sifat struktural atau pemolaan yang memungkinkan mengikat ruang dan waktu dalam sistem sosial.

Agen merupakan pelaku yang menjalankan struktur, di mana struktur dan agen bersama-sama memproduksi dan mereproduksi struktur sesuai kebutuhan masyarakat. Struktur dan agen mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan memiliki siklus yang selalu berjalan terus menerus. Struktur merupakan aturan yang diciptakan oleh agen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Struktur akan mempengaruhi agen, maka ketika struktur sosial telah diterapkan dalam masyarakat maka akan timbul persinggungan dengan kondisi masyarakat, dan akan terjadi ketidaksesuaian akibat terjadinya perubahan kondisi dari masa ke masa. Hal tersebut yang menjadikan agen harus menilik dan mereproduksi kembali struktur sosial agar sesuai dengan keadaan pada saat itu, sehingga dapat dikatakan bahwa agen mempengaruhi struktur.

Suatu bangsa ketika ingin beralih dari bangsa yang berkembang menuju bangsa yang maju pasti terdapat hambatan yang merintanginya sehingga menjadi batu sandungan yang apabila tidak hati-hati akan dapat menjatuhkan. Di Indonesia, hambatan yang dihadapi dalam menuju Indonesia maju diantaranya adalah total factor productivity Indonesia yang sangat rendah yang menjadi penyakit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Putri & F, 2023). Hambatan selanjutnya yang dihadapi Indonesia dalam menuju Indonesia maju adalah masalah pendidikan, karena salah satu indikator negara maju adalah pendidikan yang berkualitas. Dalam hal pendidikan, Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain, hal ini diketahui pada tahun 2023 dari peringkat 20 besar negara dengan pendidikan terbaik Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Sebaliknya Indonesia hanya berada pada peringkat 67 dari 203 negara dalam hal Pendidikan (Mubarok & N, 2023).

Hambatan lain yang menjadi sandungan menuju Indonesia maju adalah adanya konflik-konflik di masyarakat, tidak mau bersatunya masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dan masyarakat yang bercerai-berai (Masruro, 2023). Berbagai problem tersebut justru muncul pada masa akhir-akhir ini terutama dalam gelaran pesta demokrasi tahun 2019 silam yang melahirkan istilah cebong dan kampret dari dua kubu pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ironisnya, hal tersebut berlarut-larut pasca pilpres bahkan hingga saat ini kedua

istilah tersebut masih dapat dijumpai walaupun intensitasnya tidak sebanyak dulu dan sudah adanya rekonsiliasi dari dua kubu tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut akan dapat dihilangkan dan dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju apabila dilakukan penyatuan (unity) berbagai macam unsur masyarakat dengan tetap mempertahankan identitas dan kebudayaan (personality) yang dimilikinya dengan cara menerapkan etos kerja (performance) masyarakat yang tinggi dengan didasari atas persamaan hak (equality) sehingga dapat tercapai suatu bentuk kemerdekaan dan kebebasan (liberty) bagi masyarakat Indonesia. Kemerdekaan dan kebebasan (liberty) yang di dalamnya didasari atas persamaan hak atau kesetaraan akan menghasilkan keadilan di masyarakat. Dualitas antara agen dan struktur dalam hal ini bahwasanya dualitas terletak dalam fakta bahwa adanya hambatan-hambatan dalam mewujudkan Indonesia maju secara ringkas adalah belum terintegrasikannya masyarakat dalam konsep negara kesatuan republik Indonesia sehingga masih banyak terjadi konflik dan kesenjangan serta ketertinggalan di berbagai hal.

Dari berbagai prinsip struktural, menurut Giddens terdapat tiga besar struktur, yaitu signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Struktur signifikansi atau penandaan berkaitan dengan skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Struktur dominasi atau penguasaan mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Sementara, struktur legitimasi atau pembenaran berkaitan dengan skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Priyono & H, 2002). Ketiga gugus prinsip struktural tersebut dalam gerak praktik sosial saling terkait, di mana struktur signifikansi pada gilirannya juga akan mendukung terjadinya struktur dominasi yang menghasilkan legitimasi.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka konflik sosial dan hambatan dalam menuju Indonesia maju berupa hate speech sehingga melahirkan istilah cebong dan kampret sebagaimana terjadi beberapa tahun silam merupakan suatu bentuk praktik sosial negatif dalam bingkai struktur dominasi politik yang dipraktikkan dan “dipedomani” oleh para penganutnya sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik sosial dalam bingkai struktur legitimasi.

Hal mendasar yang dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia maju menurut Sartono Kartodirdjo adalah adanya persatuan dan kesatuan (unity). Persatuan dan kesatuan dalam konsep gugus struktur Giddens termasuk dalam praktik sosial pada gugus signifikansi. Persatuan dan kesatuan yang terbentuk dalam diri masyarakat akan menciptakan rasa solidaritas yang tinggi dan sikap patriotisme yang membara sehingga akan tercipta jiwa saling menjaga satu sama lain, tidak hanya pada tataran jasmani tapi juga terhadap materi yang dimiliki orang lain, di mana praktik tersebut merupakan praktik sosial dalam bingkai struktur dominasi. Sikap saling menjaga, patriotisme, persatuan dan kesatuan akan menghindarkan dari berbagai macam konflik yang mungkin timbul sehingga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terbentuklah suatu tata hukum yang disepakati masyarakat dalam mencapai tujuan bersama yang dalam hal ini secara gugus struktur Giddens termasuk kategori praktik sosial dalam bingkai struktur legitimasi.

Aspek penting selanjutnya dalam mewujudkan Indonesia maju menurut Sartono Kartodirdjo adalah adanya persamaan hak (equality) di mana aspek ini selaras dengan konsep politik inspiratif Mahfud MD berupa kesetaraan. Konsep kesetaraan dan

persamaan hak bermakna bahwa pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia taat dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Konsep persamaan hak Sartono Kartodirdjo dan kesetaraan Mahfud MD dalam konteks Indonesia sama dengan asas persamaan di hadapan hukum yang secara sederhana adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Asas ini disebut sebagai asas equality before the law yang menjadi asas penting dalam dunia modern (Walukow & M, 2013). Asas equality before the law menginginkan adanya perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk terhadap kelompok rentan.

Persamaan hak (equality) dan kesetaraan yang selaras dengan konsep asas equality before the law dalam praktik sosial termasuk ke dalam gugus struktur legitimasi. Persamaan di depan hukum (secara khusus) dan persamaan hak atau kesetaraan (secara umum) dalam konteks negara Indonesia akan timbul ketika proses pemerintahan berjalan dengan adil dan baik serta penegakan hukum berjalan dengan efektif, di mana hal tersebut hanya dapat tercapai apabila pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang adil dan jujur (politik inspiratif) melalui sistem dan praktik politik yang baik sehingga secara praktik sosial hal ini termasuk dalam gugus dominasi. Dominasi (penguasaan) atas politik dan ekonomi yang baik yang dibangun berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, persamaan hak dan penegakan hukum yang efektif tidak akan tercapai tanpa adanya gagasan, konsep, dan simbol yang senantiasa digelorakan dan dikonsepsikan diantaranya oleh Sartono Kartodirdjo dan Mahfud MD melalui politik inspiratifnya yang dalam hal ini secara praktik sosial menempati gugus struktur signifikansi.

Politik inspiratif salah satu bentuknya adalah bagaimana tindakan pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum menjadi kunci terwujudnya masyarakat yang merdeka dan bebas (liberty) karena masyarakat mendapatkan payung perlindungan dalam menjalankan aktivitas sosial kesehariannya. Penegakan hukum dalam praktiknya tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan usaha dan konsistensi yang keras. Etos kerja yang tinggi dibutuhkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik yang pada akhirnya ketika hukum dapat tegak tanpa pandang bulu, cita-cita mewujudkan negara yang maju bukanlah hal yang mustahil. Negara maju adalah negara yang tercipta keteraturan dalam segala bidang.

Penegakan hukum dan etos kerja merupakan hal yang berkaitan satu sama lain. Penegakan hukum merupakan praktik sosial pada gugus struktur legitimasi yang menjadi tujuan atau goal dan menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara hukum, sementara etos kerja (performance) menduduki gugus struktur dominasi, yang berfungsi sebagai perantara dalam mencapai atau mewujudkan penegakan hukum, sehingga dapat dimaknai bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum dibutuhkan etos kerja (performance) dan integritas yang tinggi. Sedangkan dalam hal ini gugus struktur berupa signifikansi adalah berupa konsep politik inspiratif yang disebarluaskan di masyarakat agar dalam berpolitik lebih berorientasi pada masa depan jangka panjang dan penyelesaian persoalan bangsa bukan semata hanya mendukung janji manis calon pejabat saja. Dikampanyekannya konsep politik inspiratif harapannya dapat membuka cara pandang masyarakat untuk memilih pemimpin dan melakukan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan yang matang sehingga nantinya akan dapat mewujudkan bangsa yang maju yaitu bangsa yang berkeadilan, setara, terdapat persamaan di depan hukum yang poin pentingnya adalah

agar tercipta persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dengan demikian konsep politik inspiratif Mahfud MD dan konsep Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan terwujudnya bangsa yang maju terdapat korelasi dan saling berkaitan serta bersifat saling bersinergi satu sama lain.

PENUTUP

Berdasarkan teori strukturasi Anthony Giddens, terdapat korelasi dan keterkaitan yang erat antara pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan untuk menjadi bangsa yang maju dengan pemikiran Mahfud MD tentang politik inspiratif. Korelasi dan keterkaitan dua pemikiran tersebut terumuskan dalam tiga gugus struktur yang terdiri dari gugus struktur signifikansi, dominasi dan legitimasi yang masing-masing saling membutuhkan dan bersinergi untuk mencapai tujuan nasional Indonesia menjadi negara maju. Pemikiran Sartono Kartodirdjo dan Mahfud MD juga relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang membutuhkan pedoman dalam bertindak mengingat banyak sekali problematika yang dihadapi bangsa Indonesia beberapa waktu terakhir. Refleksi dan implementasi pemikiran dua tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi modal dan bekal bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan nasional berupa terwujudnya Indonesia menjadi negara maju

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, & A, Z. (2020). Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens. *Jurnal Translitera*, 45.
- Achmadi, & A. (2009). Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 205.
- Ashaf, & F, A. (2006). Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*.
- Barir, & M. (1992). Kesetaraan dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 84.
- Craib, & I. (1992). Anthony Giddens. *London: Routledge*.
- Dewi, & K, Y. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Perkotaan (Studi Kasus Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto Menjadi Kawasan Wisata). *Jurnal Sosialisasi*, 24.
- Didik. (2013). Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi. In *Malang: Setara Press*.
- Faisal. (2021). Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 151.
- Furchan, & A. (1992). Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif. *Surabaya: Usana Offset Printing*.
- Giddens, & A. (2009). Problematika Utama Dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, Kontradiksi Dalam Analisis Sosial. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Giddens, & A. (2010). Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Goodman, & R, G. (2008). Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir. *Yogyakarta: Kreasi Wacana*.
- Islamiyati. (2019). Analisis Politik Hukum dan Implementasinya. *Law, Development &*

- Justice Review*, 107.
- Jary, & J, D. (1991). *Collins Dictionary Of Sociology*. In *Glasgow: Harpers Collins Publisher*.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartodirdjo, & S. (1992). *Sejarah Nasional Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Kristianto, & E, P. (2022). Integrasi Teori Strukturasi Anthony Giddens dan Kajian Feminis Pada Kebijakan Sumber Daya Manusia di Tempat Kerja. *Jurnal Dekonstruksi*, 1.
- Lebacqz, & K. (1986). *Teori-Teori Keadilan*. In Bandung: Nusa Medika.
- Masruro. (2023). *Kilas Klaten com*. Diambil Kembali Dari *Klaten.Pikiran-Rakyat.Com*.
- MD, & M, M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. In Yogyakarta: Princeton University Press.
- MD, & M, M. (2001). *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, & S. (1986). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moesa, A. M. (2007). *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LkiS.
- Mubarak, & N. (2023). *No Title Times Indonesia*. Diambil Kembali Dari *Kopi Times*.
- Murod, & C, A. (2011). Nasionalisme “Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 50.
- Nashir, & H. (2012). Memahami Strukturasi Dalam Perspektif Sosiologi Giddens. *Sosiologi Reflektif*, 4.
- Nursam, & M. (2008). *Membuka Pintu Bagi Masa Depan Biografi Sartono Kartodirdjo*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Priyono, & H, B. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Purwiyastuti, & W. (2022). *Konsep “Ekskursi”, Kandas tak Berbekas? Media Komunikasi FPIPS*. 19.
- Puskomjar. (2023). *Universitas Mulia*. Diambil Kembali Dari *Universitas Mulia*.
- Putri, & F, W. (2023). *CNBCIndonesia*. Diambil Kembali Dari *CNBCIndonesia*.
- Rahardjo, & S. (2000). *Ilmu Hukum*. In Bnadung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, & S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sukadi, & I. (2012). *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Studi Kepolisian*, 80.
- Sularto. (2022). *Kompas*. Diambil Kembali Dari *Kompas*.
- Suseno, & M, F. (1994). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Tanzeh, & A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. In Yogyakarta: Teras.
- Taufik Abdullah. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Styra Historika.
- Walukow, & M, J. (2013). *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Masyarakat Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Lex et Societatis*, 163.
- Widayani, & H. (2017). *’Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Nasionalisme di Indonesia*. *Manthiq*, 160.